

**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**NOTA DINAS**

Nomor : ND- 120 /PI.04.04/VII/2022

Yth. : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional  
Dari : Kepala Biro Persidangan Sisfo dan Pengawasan Internal  
Hal : Laporan Monitoring LHKASN dan LHKPN Semester I TA 2022  
Tanggal : 12 Juli 2022

---

1. Dasar:
  - a. Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
  - b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan ketahanan Nasional;
  - c. Peraturan Komite Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - d. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara di
  - e. Surat Edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - f. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 21 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2022 Bagi Wajib Laport di Lingkungan Setjen Wantannas;
  - g. Nota Dinas Pengawas Internal nomor ND-302/PI.04.01/III/2022 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN Setjen Wantannas.
2. Sehubungan dengan dasar diatas, disampaikan laporan monitoring LHKPN dan LHKASN Setjen Wantannas Semester I TA 2022. (terlampir)
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan  
Pengawasan Internal,



I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.  
Brigadir Jenderal TNI

## Laporan Monitoring LHKPN & LHKASN Setjen Wantannas

### A. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

#### 1. Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau disingkat LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Definisi Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, di lingkungan Setjen Wantannas terdapat subyek-subyek yang tunduk pada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya.

#### 2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN tahun pelaporan 2022 dilaksanakan mulai pada Bulan Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

#### 3. Tim Pengelola LHKPN

Sesuai dengan Kepsesjen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, pengelolaan LHKPN dilakukan oleh Admin Instansi yang pada saat ini adalah Kelompok Substansi Kepegawaian dan Kelompok Pengawasan Internal. Adapun tugas dari admin instansi adalah melakukan koordinasi dengan KPK terkait sosialisasi, monitoring, dan evaluasi terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban penyampaian LHKPN, mengajukan permintaan akun, menghimbau para wajib lapor, memberikan koordinasi dan pendampingan pengisian LHKPN bagi Sekretaris Jenderal

dan dan pejabat eselon I apabila diperlukan, melakukan pemutakhiran data penyelenggara negara wajib LHKPN paling lambat setiap tanggal 15 Desember setiap tahunnya, menyusun laporan penyampaian LHKPN periodik kepada Sekretaris Jenderal.

#### **4. Hasil Kegiatan**

Hasil Kegiatan Monitoring LHKPN sampai pada tanggal 30 Juni 2022 adalah :

##### **a. Pelaksanaan LHKPN**

- 1) Mengingatkan seluruh Pejabat/Pegawai Setjen Wantannas yang termasuk dalam Wajib Lapor untuk Tahun Pelaporan 2022 untuk segera melaporkan harta kekayaannya melalui aplikasi e-filling LHKPN melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional SE-53/KH.03.01.07/2022;
- 2) Rapat Koordinasi penyusunan Kepsesjen Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara antara Kelompok Kepegawaian dan Hukum dengan Kelompok Pengawasan Internal;
- 3) Melakukan rekonsiliasi data wajib lapor pada aplikasi yang dilakukan admin Instansi; dan
- 4) Pendampingan pada wajib lapor yang memerlukan pendampingan pada pengisian e-filling LHKPN.

##### **b. Wajib Lapor LHKPN**

Pada tahun 2022 dilakukan monitoring terhadap 53 WL (Wajib Lapor), yang terdiri dari:

- 1) Pejabat Eselon I;
- 2) Pejabat Eselon II;
- 3) Kuasa Pengguna Anggaran;
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen;
- 5) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- 6) Pejabat Fungsional yang berperan sebagai Koordinator Substansi Keuangan;
- 7) Pejabat Fungsional yang berperan sebagai Koordinator Substansi Perencanaan;
- 8) Pejabat Fungsional Auditor;
- 9) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- 10) Kepala dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan; dan
- 11) Bendahara Pengeluaran.

c. Progress Pelaporan LHKPN secara elektronik

Berdasarkan data per tanggal 30 Maret 2022, WL yang telah melaporkan LHKPN adalah sebanyak 53 orang atau 100%, dapat diartikan seluruh WL (Wajib Lapori) telah melaporkan LHKPN tepat waktu.

**e-Announcement LHKPN  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL (WANTANAS)**

Cari:

Tahun Lapori:

Kode Keamanan:  Emot & robot

**PETA KEPATUHAN**

Informasi  
Wajib Lapori: 54  
Sudah Lapori: 54 (100,0%)

Permalink data diri: 00/01/2022 20:02:07

Informasi Pengumuman Mata Kekayaan Penyelenggara Negara yang terdapat dalam plus e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. KPK tidak bertanggung jawab atas informasi Mata Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersumber dari plus dan/atau media lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara pengumuman yang terdapat dalam plus e-Announcement dengan informasi yang berasal dari plus dan/atau media lainnya, maka informasi yang dianggap valid adalah informasi yang terdapat dalam plus e-Announcement ini.

Plus ini hanya menampilkan Pengumuman Mata Kekayaan Penyelenggara Negara atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan Aplikasi e-LHKPN (mulai dari LHKPN Tahun 2017 dan seterusnya) dan menggunakan LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B.

Laporan LHKPN Tahun: 2021 | Jenis Laporan: (All)

ratus UU: 40 | Eselon: (All) | Unit Kerja: SEKRETARIAT JENDERAL | Subunit Kerja: (All)

**Pelaporan**      **Ketepatan**      **Grafik Penyampaian LHKPN**

**Wajib Lapori: 54 (100%)**      **Tepat Waktu: 54 (100%)**      **Sudah Lapori: 54**

Sudah Lapori	Wajib Lapori	Tepat Waktu	Sudah Lapori
54	54	54	54

**Grafik Penyampaian LHKPN**

Tahun	Sudah Lapori
2021	1
2022	4
2023	2
2024	4
2025	9
2026	34

## **B. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)**

### **1. Latar Belakang LHKASN**

LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mencegah lebih dini timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pencegahan penyalahgunaan wewenang di instansi pemerintah. LHKASN sebagai bentuk penguatan integritas aparatur dan merupakan dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai wujud dari transparansi Aparatur Sipil Negara. Wajib lapor LHKASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah seluruh ASN (pegawai) kecuali pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN.

### **2. Waktu Pelaksanaa Kegiatan**

Kegiatan pengelolaan dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKASN di Setjen Wantannas sejak Januari hingga Juni 2022.

### **3. Tim Pengelola LHKASN**

Tim pengelola LHKASN ini adalah APIP Setjen Wantannas mempunyai tugas sesuai dengan Surat Edaran Menpan Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Memonitoring kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan;
- b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan pimpinan instansi; dan
- d. Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika dalam proses verifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

### **4. Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan LHKASN**

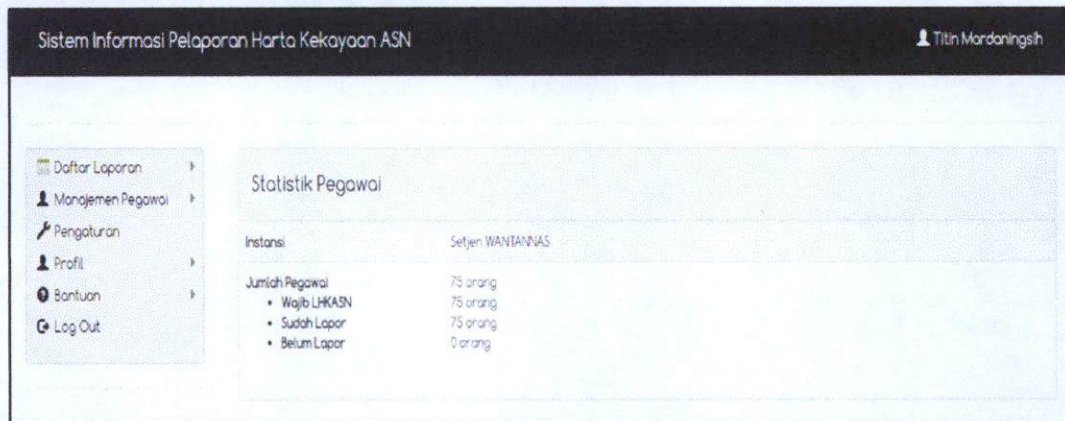
Dalam kaitan dengan penyampaian LHKASN ini telah banyak upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menumbuhkan kejujuran dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran para pegawai atas ketaatan penyampaian LHKASN, sehingga diharapkan tingkat pelaporan atau penyampaian LHKASN di lingkungan Setjen Wantannas mengalami peningkatan kedisiplinan dan efektivitas pemanfaatannya dari tahun ke tahun.

a. Pelaksanaan

- 1) Melakukan rekonsiliasi data wajib lapor LHKASN 2022;
- 2) Mengingatkan Pegawai yang tidak wajib lapor LHKPN untuk melapor LHKASN melalui Nota Dinas Kepala Biro Persidangan Sisfo dan Pengawasan Internal No 302/PI.04.01/III/2022;
- 3) Melakukan pendampingan pada wajib lapor yang memerlukan pendampingan pada pengisian SIHARKA; dan
- 4) APIP melakukan verifikasi atas data LHKASN yang telah dikirimkan pada aplikasi SIHARKA.

b. Progress Pelaporan LHKASN melalui Siharka

Jumlah wajib lapor LHKASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebanyak 75 orang, dan pelaporan LHKASN Setjen Wantannas mencapai 100% pada Bulan Maret 2022



APIP melakukan verifikasi atas laporan harta yang diterima pada aplikasi SIHARKA. LHKASN Pegawai Setjen Wantannas dinilai wajar, tidak ditemukan hal yang mencurigakan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN dan LHKASN Setjen Wantannas TA 2022 mencapai **100%**, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 97%. Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN diharapkan agar terus melakukan pemantauan laporan sehingga Tahun 2023 tingkat kepatuhan pelaporan tetap mencapai 100%.

Kepala Biro Persidangan, Sisfo dan  
Pengawasan Internal



I Gusti Putu Wirejana, S.T., M.M.S.I.  
Brigadir Jenderal TNI

**DAFTAR WAJIB LAPOR LHKPN**

No.	NIK	NAMA	JABATAN	INSTANSI	WL TAHUN	KLIS LHKP
1	'3201070802650003	DR. Ir HARJO SUSMORO, S.Sos., S.H., M.H.	SEKRETARIS JENDERAL	SEKRETARIAT JENDERAL	2021	✓
2	'3172060408670001	DENIH HENDRATA, S.H., M.M.	STAF AHLI BIDANG PERTAHANAN KEAMANAN	STAF AHLI	2021	✓
3	'3674061612640005	Dr. Ir. HENDRI FIRMAN WINDARTO, M.Eng.	STAF AHLI BIDANG IPTEK	STAF AHLI	2021	✓
4	'3175102809640003	KAREV MARPAUNG, S.SOS., M.M.	STAF AHLI BIDANG SOSIAL BUDAYA	STAF AHLI	2021	✓
5	'3374152112630005	Drs KOMARUL ZAMAN, SH, MH	STAF AHLI BIDANG HUKUM	STAF AHLI	2021	✓
6	'3322062511640003	MAYJEN TNI DRRIZERIUS EKO HADISANCOKO, S.E.,S.AP., M.SI	STAF AHLI BIDANG EKONOMI	STAF AHLI	2021	✓
7	'1106230107660016	MAMAN SUHERMAN, M.A.P., M.Han	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
8	'3308102310630002	HERU TRIYANTO, S.SOS	PEMBANTU DEPUTI URUSAN SOSIAL BUDAYA	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
9	'5171031604660020	Drs. INYOMAN LABHA SURADNYA, M. M.	PEMBANTU DEPUTI URUSAN EKONOMI	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
10	'3674011806680004	MAULANA, S.H., M.H.	PEMBANTU DEPUTI URUSAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
11	'3201021803640001	Ir. RUSMANA, M.T., M.Tr (Han)	PEMBANTU DEPUTI URUSAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
12	'3524221112700002	YUDHA FITRI	PEMBANTU DEPUTI URUSAN SOSIAL BUDAYA	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
13	'3505142509630004	ABDUL AZIS, SH. MH	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
14	'3175082505660003	DRS. AGUS SUHARTO, M.SI	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
15	'3175081201640001	DRS. AINUR ROFIQ, M.SI.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN KEAGAMAAN	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
16	'3172061302680001	Dr. DWI ARI PURWANTO, S.PD., M.PD.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN HUKUM	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
17	'2172042602660001	JATMIKO HARIYONO, M.M.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
18	'3175082503700004	MARUDUT JHONSON LUMBANTORUAN, SE	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGEMBANGAN MOBILISASI DAN DEMOBILISASI	KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN	2021	✓
19	'3175040409650005	LAKSDA TNI GREGORIUS AGUNG WIDJONO DJALU, M.Tr (Han)	DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
20	'3273183107660001	SYACHRIYAL EFFENDHY SIREGAR, S.E.	PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNASIONAL	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
21	'3578051311660003	BAMBANG EKO PALGUNADI, S.T., M.A.P.	PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
22	'3175082502640006	SUYITNO	PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN STRATEGIS REGIONAL	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
23	'1671051212640008	SUHERLAN	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI INTERNASIONAL	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
24	'3175095802640002	DRA SRI HARYANI, M.M.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI NASIONAL	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
25	'3174010705650007	Dr. Ir. RUSTAM, M.Si, ST.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI REGIONAL	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
26	'3175081912680001	DRS. AHMAD YANI, S.H., M.T.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL BUDAYA NASIONAL	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
27	'3271042412650015	DRS. NUROFIK	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL BUDAYA REGIONAL	KEDEPUTIAN PENGAJIAN DAN PENGINDERAAN	2021	✓
28	'3374041501640002	Drs. SUKMA EDI MULYONO, M.H.	DEPUTI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
29	'3674010911720001	H. NAZIRWAN ADJI WIBOWO, S.I.K., M.Si.	PEMBANTU DEPUTI URUSAN POLITIK NASIONAL	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
30	'3578290504640001	HADI SUSILO, M.SI.	PEMBANTU DEPUTI URUSAN RENCANA KONTIJENSI	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
31	'3175080510660002	DR. AFRIZAL HENDRA, SIP., M.SI., CHRMP	PEMBANTU DEPUTI URUSAN STRATEGI NASIONAL	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓



32	'5102062202640003	FRANS THOMAS	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG EVALUASI DAN TOLERASI RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
33	'3578271704760005	EKO ERY S HIDAYANTO, S.T., M.M., CHRMP	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA POLITIK NASIONAL	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
34	'3175081805670007	YUFIE SYAFARI, S.E.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG RENCANA KONTIJENSI EKONOMI KEAMANAN	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
35	'1375030704680001	JOKO SETYO PUTRO	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG RENCANA KONTIJENSI POLITIK KEAMANAN	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
36	'3671122903680003	SINDU UTOMO	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA SEDANG DAN JANGKA PENDEK	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
37	'3173055805650004	SITI AMINAH	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG	KEDEPUTIAN POLITIK DAN STRATEGI	2021	✓
38	'3271011807660006	MOH. HATTA USMAR RUKKA	DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
39	'1371021006650007	DRS. HARIS SARJANA, M.M., M.TR (HAN)	PEMBANTU DEPUTI URUSAN INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
40	'3175052011660003	DRS. JAKA TANDANG, M.CS., M.A.P.	PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN ALAM	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
41	'3275080209640011	MOCHAMAD AFFANDI, S.Ip., M.M.	PEMBANTU DEPUTI URUSAN LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NEGARA	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
42	'1808013007670002	YULIAS, SIK	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG GEOGRAFI	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
43	'3273060310700005	Dr BONAN DO SIAGIAN, S.E., M.SI (Han)	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG LEMBAGA	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
44	'3175080202690004	AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E., M.M.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL EKONOMI	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
45	'3201025804680006	Dra. SRI RAHAYU PURWANINGTYASTUTI	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
46	'3271052703630002	IR. HADIAN ANANTA WARDHANA, CES.	ANALIS KEBIJAKAN BIDANG TATA SARANA DAN PRASARANA	KEDEPUTIAN SISTEM NASIONAL	2021	✓
47	'3175080511640006	SHOPIAN KOHAR	KEPALA BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN KEUANGAN	BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN KEUANGAN	2021	✓
48	'3173052611660003	I GUSTI PUTU WIREJANA, S.T., M.M.SI.	KEPALA BIRO PERSIDANGAN, SISFO, DAN PENGAWASAN INTERNAL	BIRO PERSIDANGAN, SISFO, DAN PENGAWASAN INTER	2021	✓
49	'3172061806660002	SUPENDI, S.T., M.Tr.Opsla	KEPALA BIRO UMUM	BIRO UMUM	2021	✓
50	'3172034702750008	TITIN MARDYANINGSIH, S.E., M.M.	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN INTERNAL	BIRO PERSIDANGAN, SISFO, DAN PENGAWASAN INTER	2021	✓
51	'3671056608830004	MUTIA TRI YULIYATI, SE	KASUBBAG PENGADAAN BAGIAN PERLENGKAPAN BIRO UMUM	BIRO UMUM	2021	✓
52	'3171010704840002	RISWONDO, -	BENDAHARA PENGELUARAN SUBBAG PERBENDAHARAAN	BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN KEUANGAN	2021	✓
53	'3275080302860010	WIM RUSKA, A.Md	PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN SUBBAG PENGADAAN (PPBJ PROG 01)	BIRO UMUM	2021	✓

**DAFTAR WAJIB LAPOR LHKASN TA 2022**

No.	Nama	Status Laporan Tahun Sebelumnya			Keterangan Pelaporan 2022	Status	Checklist LHKASN
		Golongan	Eselon	Jabatan			
1	Imam Supriyadi	IV/a	Fungsional Ahli Tertentu	Analisis Kepegawaian Ahli Madya selaku Korporasi Kepegawaian dan Hukum	Periodik	Aktif	v
2	Tri Hariyadi	IV/a	Fungsional Ahli Tertentu	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana	Periodik	Aktif	v
3	La Piliha	IV/a	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Persuratan Bagian TU dan Protokol	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
4	Zainuddin	III/d	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Verifikasi Bagian Keuangan	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
5	Sutawijaya	III/d	Fungsional Ahli Tertentu	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Barang Milik Negara	Periodik	Aktif	v
6	Chairul Didiek Djunaedi	III/d	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Kearsipan Bagian TU dan Protokol Biro Umum	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
7	Susi Hendrawati	III/d	Fungsional Ahli Tertentu	Arsiparis Ahli Muda	Periodik	Aktif	v
8	Kriswanto	III/d	Fungsional Ahli Tertentu	Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Data dan Keamanan Informasi	Periodik	Aktif	v
9	Desi Fajar Nita	III/d	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Hubungan Media dan Publikasi Bagian Persidangan dan Humas	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
10	Yadi Kurniawanto	III/d	Fungsional Ahli Tertentu	Kepala Bagian Keuangan	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
11	Jumadi Saman	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Sub Koordinator Kelompok Organisasi dan Fasilitas RB Kelompok Organisasi dan Tata Laksana Biro POK	Periodik	Aktif	v
12	Denyadi	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Protokol dan Pengamanan Bagian TU dan Protokol Biro Umum	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
13	Agus Sutarja	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag TU Depolstra Bagian TU dan Protokol	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
14	Mhammad Agusssyah	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Perencanaan	Periodik	Aktif	v
15	Suntama	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Rumah Tangga Bagian Perlengkapan	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
16	Agus Suprpto	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Sub Koordinator Kelompok Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian	Periodik	Aktif	v
17	Susi Amiliawaty	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
18	Reno Ardiansyah	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Analisis Kepegawaian Ahli Muda, Sub Koordinator Pok Disiplin dan Kehadiran Pegawai	Periodik	Aktif	v
19	Dedy Purwadi	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Kelompok Teknologi Informasi Kelompok Sistem Informasi	Periodik	Aktif	v
20	Eka Rosilawati	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Arsiparis Ahli Muda Subkorporasi TU Dejiandra Bagian TU dan Protokol Biro Umum	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
21	Deviana Oktoria	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Hukum Bagian Kepegawaian dan Hukum	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
22	Prasetyo	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v
23	Handi Ishak	III/c	Fungsional Ahli Tertentu	ARSIPARIS AHLI MUDA SUB KOORD POK PERSURATAN TU DAN PROTOKOL BRO UMUM	Periodik	Aktif	v
24	Riza Savitri	III/b	III.b	Kasubbag Protokol dan TU Pimpinan Bagian Perlengkapan dan PPBJ	Perubahan jabatan	Aktif	v
25	Ngatiman	III/b	Fungsional Ahli Tertentu	Analisis Kebijakan BMN	Periodik	Aktif	v
26	Sumartono	III/b	Fungsional Ahli Tertentu	Analisis Tata Usaha Subbag TUSesjen Bagian TU Protokol Biro Umum	Periodik	Aktif	v
27	Purwanto	III/b	Fungsional Ahli Tertentu	Staf	Periodik	Aktif	v
28	Ino	III/b	Fungsional Ahli Tertentu	Analisis TU Subbag TU Debang Bagian TU dan Protokol Biro Umum	Periodik	Aktif	v
29	Sartono	III/b	Fungsional Ahli Tertentu	Staff TU Depolstra	Periodik	Aktif	v
30	Enang Suhendar	III/b	Fungsional Ahli Tertentu	Analisis Manajemen Perkantoran	Periodik	Aktif	v
31	Mila Purnama Yulianti	III/b	Fungsional Ahli Tertentu	Analisis Tata Usaha Kedeputian Sistem Nasional	Periodik	Aktif	v
32	Eka Puji Astuti	III/b	Fungsional Ahli Tertentu	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan	Perubahan Jabatan Struktural - Fungsional	Aktif	v

33	Yesilia Prahastasi	III/b	Staff/Fungsional Ahli Umum	PENYULUH KEARSIPAN	Periodik	Aktif	v
34	Supardi	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Periodik	Aktif	v
35	Agus Munadi	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Tata Usaha Subbag TU Sistem Nasional	Perubahan jabatan	Aktif	v
36	Rissa Henriani	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Tata Usaha Subbag TU Sistem Nasional	Pelaporan Pertama	Belum Aktif : IYW314	v
37	Roy Wariko	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	ANALIS KEBIJAKAN BMN	Perubahan jabatan	Aktif	v
38	Amalia Fajarina	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Hukum	Periodik	Aktif	v
39	Dian Ayu Pertiwi	III/a	Staff/Fungsional Ahli Tertentu	Auditor Ahli Pertama	Periodik	Aktif	v
40	Andre Pamungkas	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Keuangan	Periodik	Aktif	v
41	Daniel Maruli Tua Manik	III/a	Staff/Fungsional Ahli Tertentu	Auditor Ahli Pertama	Periodik	Aktif	v
42	Genanto Atmadiredja	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Periodik	Aktif	v
43	Bayu Prawiradisma Siregar	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KINERJA	Periodik	Aktif	v
44	Rochaeni	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Keuangan	Periodik	Aktif	v
45	Alvin Rayinda Pramasha	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Periodik	Aktif	v
46	Nasrul Ma'Arif	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Kelembagaan	Periodik	Aktif	v
47	Anindhita Primanisantiara Fildatie	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Persandian	Periodik	Aktif	v
48	Nadia Talita Putri	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Persandian	Periodik	Aktif	v
49	Tisa Siti Rachmawati	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Organisasi dan Tatalaksana	Periodik	Aktif	v
50	Raka Narhadi Saputra	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Periodik	Aktif	v
51	Affiah Fitriani	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Periodik	Aktif	v
52	Karina Dewi	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Hukum	Periodik	Aktif	v
53	Sely Kurniawati	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum		Periodik	Aktif	v
54	Haryo Sasmito	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis SDM Aparatur	Periodik	Aktif	v
55	Adi Nugroho	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Sistem Informasi	Periodik	Aktif	v
56	Helfrida Sinaga	III/a	Staff/Fungsional Ahli Tertentu	Auditor Ahli Pertama	Periodik	Aktif	v
57	Andreas Christian Siahaan	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Sistem Informasi	Periodik	Aktif	v
58	Andreas	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	Periodik	Aktif	v
59	Maulidya Nurisya	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Periodik	Aktif	v
60	Riedjanti Restu Biandari	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Periodik	Aktif	v
61	Natalina Pakpahan	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Publikasi	Periodik	Aktif	v
62	Fauziah Nurunnajmi	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Hubungan Antarlembaga	Periodik	Aktif	v
63	Renie Dwi Sulistyani	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Periodik	Aktif	v
64	Sofyanti Astri	III/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	Penata Keuangan	Periodik	Aktif	v
65	Hanung Utoro	II/d	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pengelola Keuangan Subbag TU Dejiandra	Periodik	Aktif	v
66	Kiswanto	II/d	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pengelola Keuangan Subbag TU Dejiandra, Bagian TU dan Protokol Biro Umum	Periodik	Aktif	v
67	Raharjo	II/d	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pengelola keuangan TU Polstra	Periodik	Aktif	v
68	Efendi	II/d	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pengelola Keuangan Subbag TU Debang Bagian TU dan Protokol Biro Umum	Perubahan jabatan	Aktif	v

69	Agus Winaryo	II/c	Staff/Fungsional Ahli Umum	pengadministrasi sarpras	Periodik	Aktif	v
70	Galih Pamungkas Sabriarso	II/c	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	Periodik	Aktif	v
71	Guspahri Ardiansyah Hasihuan	II/c	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Periodik	Aktif	v
72	Robby Haryadi	II/c	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	Periodik	Aktif	v
73	Yayat Ruhiat	II/c	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pranata Komputer terampil	Periodik	Aktif	v
74	Jordan Hendrix Setiawan	II/c	Staff/Fungsional Ahli Umum	Pranata Komputer Terampil	Periodik	Aktif	v
75	Rusmanto	II/a	Staff/Fungsional Ahli Umum	PENGADMINSTRASIAN PERSURATAN	Periodik	Aktif	v